

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi (Agency Theory)

Teori Agensi (*Agency Theory*) merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara agen dan prinsipal. Hubungan keagenan menjelaskan dimana satu atau lebih orang (prinsipal) menunjuk orang lain (agen) untuk melakukan pekerjaan tertentu atas nama prinsipal, yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan tertentu kepada agen (Jensen & Meckling, 1976). Prinsipal sebagai penyedia dana akan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen dan untuk menjalankan perusahaan. Prinsipal berharap agen akan menghasilkan pengembalian dari dana yang mereka tanamkan. Di sisi lain, agen wajib mengelola perusahaan didasarkan pada keinginan prinsipal. Sebagai implikasi dari akuntabilitas manajemen kepada pemegang saham, di setiap periode, manajemen akan menyediakan laporan yang memuat informasi perusahaan kepada para pemegang saham.

Jika kedua belah pihak dalam hubungan memaksimalkan peran mereka, ada alasan bagus untuk percaya bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal. Agen tertarik untuk memaksimalkan kebutuhan finansial dan psikologisnya. Agen sebagai pengelola perusahaan tentunya perlu memberikan informasi kepada klien tentang status perusahaan dalam bentuk laporan keuangan dan pengungkapan informasi akuntansi lainnya. Perbedaan kepentingan ini dapat menyebabkan agen memanipulasi kinerja laporan untuk keuntungannya sendiri, yang mengakibatkan kurangnya integritas dalam praktik pelaporan keuangan. Dalam teori keagenan, informasi akuntansi manajemen melayani dua tujuan. Pertama, digunakan untuk pengambilan keputusan prinsipal dan agen. Kedua, digunakan untuk mengevaluasi dan berbagi hasil berdasarkan kontrak kerja yang ditetapkan dan disetujui. Agen sebagai pengelola perusahaan tentu akan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan dibandingkan dengan prinsipal. Maka dari itu prinsipal dapat membatasi perbedaan kepentingan dengan membentuk mekanisme insentif yang sesuai untuk manajemen dan melakukan pengawasan yang bertujuan untuk

membatasi aktivitas manajemen yang menyimpang (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan adalah dasar untuk memahami *corporate governance*. *Corporate Governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, yang diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk membuat investor yakin bahwa mereka akan mendapatkan pengembalian dana yang telah diinvestasikan.

2.1.2. Good Corporate Governance

Corporate Governance merupakan seperangkat pengaturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka, atau sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. Untuk memperoleh informasi yang lebih andal (informasi yang dapat dipercaya) agar tercipta laporan keuangan yang konservatif dan sangat jujur yang dapat digunakan oleh banyak orang, maka perlu dilakukan pengawasan yang bertujuan untuk menghindari perilaku buruk (seperti kecurangan manajemen). Pengawasan dilakukan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang terstruktur dan terorganisir dengan baik dengan konsep *Good Corporate Governance* (Rosalina et al., 2019).

Penerapan *Good Corporate Governance* membutuhkan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pemegang saham minoritas. Prinsip atau pedoman penerapan *corporate governance* menunjukkan perlindungan ini. Tata kelola perusahaan yang baik, menurut definisi, adalah sistem yang dapat mengawasi dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Mekanisme *Good Corporate Governance* adalah aturan, prosedur dan hubungan yang jelas antara pengambil keputusan dan pengambil keputusan pengendali/supervisi. Mekanisme *corporate governance* bertujuan untuk memastikan dan mengawasi jalannya sistem tata kelola dalam organisasi (Ayem & Yuliana, 2019a).

Agar laporan keuangan berintegritas, sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, maka perusahaan harus mempunyai mekanisme *corporate governance* untuk melaksanakan fungsi pengawasan yaitu dilihat dari kepemilikan manajerial, frekuensi rapat dewan komisaris, dan frekuensi pertemuan

komite audit. Dengan penerapan *Good Corporate Governance* akan mengurangi peluang pihak manajemen untuk melakukan kecurangan.

Sistem *Good Corporate Governance* menuntut dibangun dan dijalankannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di dalam organisasi perusahaan. Dengan dijalankannya prinsip-prinsip ini, diharapkan akan memberikan manfaat kepada para stakeholdernya dan juga perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan. Menurut *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (2006) prinsip-prinsip *Good Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

- Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dalam hal ini maksudnya kewenangan yang harus dimiliki oleh pihak manajemen kepada pihak *shareholders* dan *stakeholders* lainnya. Dewan direksi mempunyai tanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh *shareholders*. Dewan komisaris mempunyai tanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan kewajibannya memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai. Pihak *shareholders* memiliki tanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam pengelolaan perusahaan.

- Responsibilitas (*Responsibility*)

Memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku. Prinsip ini mengutamakan adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pihak *shareholders* dan *stakeholders* lainnya. Hal ini dilakukan untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai dalam *Good Corporate Governance*, yaitu mendukung kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis, dan sebagainya. Prinsip ini menuntut manajer perusahaan dan pimpinan untuk melakukan kegiatannya dengan bertanggung jawab.

- Transparansi (*Transparency*)

Prinsip ini mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan, dan pengelolaan keuangan perusahaan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, dan *stakeholders* lainnya. Keterbukaan informasi dilakukan agar pihak *shareholders* dan *stakeholders* lainnya mengetahui keadaan perusahaan, sehingga nilai pemegang saham bisa ditingkatkan.

- Independensi (*Independency*)

Independensi merupakan syarat mutlak bagi sebuah perusahaan agar dapat berfungsi dengan baik dan mampu mengambil keputusan yang tepat. Organ perusahaan akan menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Menjadikan masing-masing perusahaan tidak saling mendominasi satu sama lain dan bebas dari campur tangan pihak lain.

- Keserataan (*Fairness*)

Prinsip ini mengutamakan pada jaminan perlindungan hak-hak para *shareholders*. Seluruh *stakeholders* termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan adil dari perusahaan. Maka dari itu perusahaan akan melarang praktek-praktek yang tidak baik yang dilakukan oleh bagian internal perusahaan dan dapat merugikan pihak lain. Anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan hal-hal yang mengandung benturan kepentingan. Mekanisme tata kelola perusahaan adalah aturan main yang jelas, prosedur dan hubungan setiap departemen di perusahaan untuk menjalankan fungsi dan kewajibannya, untuk memastikan dan memantau operasi sistem manajemen dalam organisasi (Walsh & Seward, 1990). Menurut Walsh & Seward (1990) ada dua mekanisme yang membantu menyeimbangkan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance* yang baik, yaitu: mekanisme pengendalian internal perusahaan dan mekanisme pengendalian eksternal.

Pengendalian internal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan dengan mengembangkan seperangkat aturan untuk mengelola baik keuntungan, keuntungan, dan mekanisme risk-reward, yang semuanya disetujui oleh agen dan agen. Menyeimbangkan kepentingan pemegang saham dan manajemen adalah kontrak insentif jangka panjang Walsh & Seward (1990). Oleh karena itu, pemimpin merupakan motor penggerak untuk meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan kekayaan para pemegang saham. Hal ini karena juga meningkatkan kekayaan pemimpin itu sendiri. Mekanisme pengendalian eksternal adalah pengendalian perusahaan di pasar Menurut teori pasar pengendalian perusahaan, ketika diketahui manajemen memiliki perilaku egois, kinerja bisnis perusahaan menurun, hal ini menjadi harga saham perusahaan ini akan tercermin.

Penerapan *Good Corporate Governance* membutuhkan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pemegang saham minoritas. Prinsip atau pedoman penerapan *corporate governance* menunjukkan perlindungan ini. Tata kelola perusahaan yang baik, menurut definisi, adalah sistem yang dapat mengawasi dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Mekanisme *Good Corporate Governance* adalah aturan, prosedur dan hubungan yang jelas antara pengambil keputusan dan pengambil keputusan pengendali/supervisi. Mekanisme *corporate governance* bertujuan untuk memastikan dan mengawasi jalannya sistem tata kelola dalam organisasi (Ayem & Yuliana, 2019).

2.1.2.1. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajemen adalah kepemilikan saham oleh manajemen yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Menurut Siahaan (2017) kepemilikan manajemen dapat menyelaraskan kepentingan pemegang saham dengan kepentingan manajemen. Memiliki keputusan yang buruk. Masalah keagenan sering muncul ketika manajemen tidak memiliki saham pengendali dalam bisnis, sehingga manajemen cenderung bertindak demi kepentingan terbaiknya sendiri dan ketika membuat keputusan pendanaan tidak memaksimalkan kinerja perusahaan (Fitriya, 2020).

Wahidahwati (2002) mendeskripsikan bahwa kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Direktur atau Komisaris). Kepemilikan manajerial diukur dari jumlah presentase saham yang dimiliki manajer. Pernyataan yang serupa dikemukakan oleh Faisal (2005) bahwa kepemilikan manajerial adalah persentase saham yang dimiliki oleh eksekutif dan direktur. Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan kepemilikan manajerial sebagai persentase kontribusi dan kepemilikan opsi oleh manajemen dan komisaris dalam organisasi. Oleh karena itu, kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai persentase suara yang berkaitan dengan saham dan option yang dimiliki oleh manajer dan komisaris suatu perusahaan. Dalam penelitian ini kepemilikan manajerial disimpulkan sebagai gabungan kepemilikan dari seluruh dewan direksi di perusahaan.

Menurut Syahrul & Nizar (2000) kepemilikan manajerial adalah pemegang saham, direksi atau pejabat perseroan yang memiliki proporsi yang signifikan dalam saham perseroan. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan kepemilikan manajerial adalah presentase saham yang dimiliki manajer dan direksi suatu perusahaan.

Menurut Verya et al. (2017) kepemilikan manajerial merupakan persentase saham yang dimiliki oleh manajemen meliputi direksi dan komisaris perusahaan. Indikator untuk mengukur kepemilikan manajerial dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$MNJMN = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan manajer yang berperan aktif dalam pengambilan keputusan, juga merupakan pemegang perusahaan tersebut. Dengan adanya kepemilikan manajerial, maka akan mengurangi konflik keagenan yaitu manajer tidak lagi mementingkan kepentingannya sendiri karena ia merupakan pemegang saham dari perusahaan tersebut. Manajer akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena jika ia salah mengambil keputusan akan merasakan konsekuensinya secara langsung.

2.1.2.2. Kepemilikan Intitusional

Struktur kepemilikan merupakan jenis institusi atau perusahaan yang memegang saham terbesar dalam suatu perusahaan (Wahyudi & Prawestri, 2006). Struktur kepemilikan dapat berupa investor individual, pemerintah, dan institusi wasta. Secara spesifik kategori struktur kepemilikan meliputi kepemilikan oleh institusi domestik, institusi asing, pemerintah, karyawan dan individual domestik. Struktur kepemilikan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya.

Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Menurut Itturiaga & Sanz (2000) struktur kepemilikan dapat dijelaskan dari dua sudut pandang yaitu pendekatan keagenan (*agency approach*) dan pendekatan ketidakseimbangan (*asymmetric information approach*). Menurut pendekatan keagenan, struktur kepemilikan merupakan suatu ekanisme untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Sedangkan pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara insider dan outsider melalui pengungkapan informasi di dalam pasar modal. Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme GCG yang dapat mengendalikan masalah keagenan.

Menurut Wahidahwati (2002) kepemilikan institusional didefinisikan sebagai kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Menurut Wening (2009) kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen.

Menurut Rachmawati & Triatmoko (2007) pengukuran kepemilikan institusional adalah sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki oleh institusi}}{\text{Jumlah total saham biasa}}$$

2.1.2.3. Biaya Corporate Social Responsibility

Menurut WBCSD (*The World Business Council for Sustainable Development*) (2000), *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan diinterpretasikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun pembangunan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan CSR sebagai kontribusi bisnis untuk pembangunan berkelanjutan dan bahwa perilaku perusahaan harus tetapi hanya memastikan pengembalian kepada pemegang saham, upah kepada karyawan, dan produk dan layanan kepada konsumen, tetapi mereka harus menanggapi masalah dan nilai masyarakat dan lingkungan. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa CSR sebagai kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan serta perilaku perusahaan yang tidak semata-mata menjamin adanya return bagi para pemegang saham, upah bagi para karyawan, produk serta jasa bagi para pelanggan, melainkan perusahaan juga

harus memberikan perhatian terhadap berbagai hal yang dianggap penting serta nilai-nilai masyarakat.

Definisi *Corporate Social Responsibility* menurut Business for Social Responsibility (BSR) adalah pencapaian kesuksesan perusahaan dengan jalan memperhatikan nilai etika, dan menghormati orang-orang, masyarakat, dan lingkungan. Tanggung jawab sosial merupakan seperangkat kebijakan, tindakan, dan program yang terpadu dimana diintegrasikan dalam operasi bisnis, persediaan, dan proses pengambilan keputusan dan biasanya meliputi permasalahan yang berhubungan dengan etika bisnis, investasi, masyarakat, perhatian lingkungan, governance, hak asasi, dan lingkungan kerja (Tsoutsoura, 2004).

Biaya *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ditimbulkan dari seluruh aktivitas sosial disajikan dalam laporan keuangan sebagai bagian dari pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*). Pelaporan keberlanjutan menyajikan laporan terkait dengan kebijakan ekonomi, lingkungan sosial, kinerja organisasi serta produk perusahaan perusahaan dalam konteks pembangunan keberlanjutan (*sustainability development*). Penyajian biaya *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam laporan keuangan tersebut diharapkan menjadi dokumen strategi bagi perusahaan agar mampu menganalisis tantangan dan peluang (Agnelia et al., 2020). Pengukuran biaya *Corporate Social Responsibility* (CSR) dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Indeks BCSR} = \frac{\text{Biaya Corporate Social Responsibility (CSR)}}{\text{Laba Bersih}} \times 100\%$$

(A. M. Putra, 2016)

2.1.3. *Firm Size* (Ukuran Perusahaan)

Pada dasarnya, ukuran perusahaan hanya terbagi atas tiga kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*), dan perusahaan kecil (*small firm*) (Isbanah, 2015). Pernyataan tersebut serupa dengan definisi ukuran perusahaan menurut Ngurah et al. (2016) bahwa Ukuran perusahaan merupakan cerminan total dari aset yang dimiliki suatu 2 perusahaan. Perusahaan sendiri dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu perusahaan berskala kecil

dan perusahaan berskala besar. Darmawari (2004) menyatakan bahwa perusahaan besar pada dasarnya memiliki kekuatan finansial yang lebih besar dalam menunjang kinerja, tetapi disisi lain, perusahaan dihadapkan pada masalah keagenan yang lebih besar.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain (Suwito & Herawaty, 2005). Menurut Nurcahya et al. (2014) Ukuran perusahaan merupakan hal yang penting dalam proses pelaporan keuangan. Terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan, yaitu jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan melihat seberapa Total penjualan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan.

Nurcahya et al. (2014) Ukuran perusahaan merupakan hal yang penting dalam proses pelaporan keuangan. Terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan, yaitu jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar. Proksi yang akan digunakan dalam mengukur ukuran perusahaan tersebut yaitu:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln} (\text{Total Penjualan})$$

(Nurcahya et al., 2014)

2.1.4. Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan penilaian perbuatan manusia dalam suatu organisasi agar dapat berhasil untuk meningkatkan prestasi atau hasil nyata yang positif (Mulyadi, 2001). Kinerja keuangan yaitu suatu prestasi pada bidang keuangan yang komponen-komponennya berhubungan dengan pendapatan, pengeluaran, seluruh keadaan operasional, struktur utang serta hasil investasi. Hasil atau prestasi kerja perusahaan dapat dipergunakan dalam menggambarkan efektivitas manajemen dalam kegiatannya mendapatkan keuntungan atas pengelolaan aset, ekuitas maupun utang perusahaan kepada berbagai pihak yang membutuhkan misalnya pemegang saham dan stakeholders.

Menurut pendapat Aditya Putra Dewa (2018) Dalam pengukuran kinerja keuangan perusahaan, informasi yang relevan atau berhubungan dengan kegiatan

perusahaan dalam mengungkap baik tidaknya kinerja perusahaan adalah dengan analisis laporan keuangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan untuk menghasilkan penjualan, pengembalian modal usaha dan kemampuan mengelola utangnya yang dipergunakan untuk belanja aktiva itu merupakan kinerja keuangan.

Menurut Sucipto (2007) tujuan untuk menilai kinerja keuangan yaitu:

- 1) Mengendalikan operasi organisasi dengan efektif dan efisien dengan memaksimalkan motivasi kepada karyawan. Dalam mengoperasikan suatu perusahaan, manajemen memilih objek yang akan diraih pada masa yang akan datang dan didalam sistem itu disebut dengan planning.
- 2) Membantu menetapkan keputusan yang berkaitan dengan karyawan semacam promosi, transfer dan pemberhentian. Pengukuran kinerja dapat menghasilkan data yang dapat digunakan sebagai dasar menetapkan keputusan yang berkaitan dengan karyawan yang diukur berdasarkan kinerjanya.
- 3) Mengidentifikasi kepentingan pengembangan dan pelatihan karyawan dan untuk mempersiapkan tolak ukur pemilihan dan evaluasi program training karyawan menyesuaikan dengan keperluan karyawan.
- 4) Mempersiapkan umpan balik bagi karyawan mengenai pengukuran kinerja yang dilakukan oleh atasan kepada karyawannya. Pelimpahan sebagian wewenang manajemen atas kepada manajemen dibawah mereka dalam suatu organisasi perusahaan.
- 5) Mempersiapkan inti dari distribusi penghargaan. Hasil penilaian dapat digunakan sebagai alat evaluasi kinerja manajemen terkait sudah efektif tidaknya mereka bekerja selama ini. Jika sukses dalam mencapai target yang telah ditentukan maka mereka berhasil dalam mencapai target untuk beberapa periode ataupun semua periode.

Munawir (2010) kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisa terhadap rasio keuangan perusahaan. Pihak yang berkepentingan sangat memerlukan hasil dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan untuk dapat melihat kondisi perusahaan dan tingkat keberhasilan perusahaan dalam

menjalankan kegiatan operasionalnya. Sawir (2003) dalam menilai kinerja keuangan yang menggunakan analisis rasio keuangan perlu diketahui standar rasio keuangan tersebut. Yuwono et al. (2003) dengan adanya standar rasio keuangan, perusahaan dapat menentukan apakah kinerja keuangannya baik atau tidak. Penilaian ini dilakukan dengan membandingkan rasio keuangan yang diperoleh dengan standar rasio keuangan yang ada. Pada umumnya, kinerja keuangan perusahaan dikategorikan baik jika besarnya rasio keuangan perusahaan bernilai sama dengan atau di atas standar rasio keuangan (Wijaya, 2019).

Salah satu cara untuk menilai efisiensi kinerja keuangan dari suatu usaha dalam manajemen keuangan adalah dengan menggunakan analisis rasio profitabilitas. Analisis profitabilitas diperlukan untuk menilai besar kecilnya produktifitas usaha sebuah perusahaan. Menurut Munawir (2004) rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio ini memberikan gambaran tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan. Profitabilitas sering digunakan dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara laba dan modal yang digunakan dalam operasi. Pemodal dapat menggunakan profitabilitas suatu perusahaan sebagai alat untuk mengukur modal yang ditanamkan perusahaan tersebut. Salah satu rasio yang umumnya digunakan sebagai pengukur kinerja keuangan perusahaan adalah *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE)

2.1.4.1. Return On Assets (ROA)

Menurut Mardiyanto (2009) *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba karena rasio tersebut mewakili pengembalian atas aktivitas perusahaan. Menurut Hery (2014) semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset tersebut.

Kasmir (2012) *Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu ROA

memberikan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Dan menurut Hery (2014) *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Semakin besar ROA maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan *assets*.

Menurut Munawir (2007) *Return on Assets* merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendaptan, aset, dan modal saham tertentu. Faisal (2005) menyatakan bahwa *Return On Assets* adalah rasio yang mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih dari pengelolaan aset yang telah dimiliki.

Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. Dengan mengetahui ROA dapat menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktivitya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan. Laba bersih (*net income*) merupakan ukuran pokok keseluruhan keberhasilan perusahaan. ROA dapat membantu perusahaan yang telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik untuk mengukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri. Rumus yang digunakan untuk mengukur ROA:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

2.1.4.1. *Return On Equity* (ROE)

Selain menggunakan ROA untuk mengukur kinerja keuangan juga dapat menggunakan *Return On Equity* (ROE). Menurut Kasmir (2012) *Return On Equity*

(ROE) atau hasil pengembalian ekuitas merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik, artinya posisi perusahaan semakin kuat demikian sebaliknya.

Hery (2014) menyatakan bahwa *Return On Equity* (ROE) merupakan hasil pengembalian atas ekuitas merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap ekuitas. Sedangkan menurut Fahmi (2011) ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas.

Menurut Eduardus (2001) menyatakan bahwa *Return On Equity* menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang bisa diperoleh pemegang saham. Sementara menurut bahwa *Return On Equity* adalah mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu. Rumus yang digunakan untuk mengukur ROE:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

2.2. Hubungan Antar Variabel

2.2.1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan

Konsep teori agensi didasari pada permasalahan agensi yang muncul ketika pengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Perusahaan merupakan mekanisme yang memberikan kesempatan kepada berbagai partisipan untuk berkontribusi dalam bentuk modal, keahlian serta tenaga kerja dalam rangka memaksimalkan keuntungan jangka panjang (Cahyani, 2009).

Jensen & Meckling (1976) mengatakan jika kepemilikan saham oleh manajer pada perusahaan semakin besar maka akan timbul kecenderungan manajemen untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan juga mengurangi biaya agensi karena adanya perbedaan kepentingan. Hal tersebut diakibatkan keterlibatan

manajer dalam perusahaan sehingga manajer merasa memiliki perusahaan yang kemudian mengakibatkan segala keputusan yang diambil dilakukan dengan lebih hati-hati karena melihat konsekuensi yang akan diterima manajer dalam setiap pengambilan keputusan. Sehingga, manajer yang memiliki saham perusahaan akan menyusun strategi guna meningkatkan kinerja perusahaan terutama untuk jangka panjang. Sesuai penelitian yang dilakukan oleh (Indarti & Extaliyus, 2013); (Setiawan, 2017); (Sari et al., 2019)) membuktikan bahwa adanya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Indriati, 2018), (Handayani, 2018), (Suryanto & Refianto, 2019)) yang menyatakan bahwa seharusnya fungsi rangkap yang dimiliki pihak manajemen dapat memberikan hak kontrol oleh manajer terhadap perusahaan karena manajer yang memiliki saham perusahaan sudah bisa bertindak sebagai pemilik perusahaan. Namun dengan jika proporsi kepemilikan manajerial yang rendah menyebabkan pihak manajemen belum memiliki kontrol yang cukup kuat untuk mengendalikan perusahaan. Rendahnya saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan mengakibatkan pihak manajemen belum merasa ikut memiliki perusahaan karena tidak semua keuntungan dapat dinikmati oleh pihak manajemen yang menyebabkan pihak manajemen kurang termotivasi dan kinerja manajemen rendah sehingga tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

2.2.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar perusahaan yang menjadi peran penting dalam perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional maka akan mengurangi masalah keagenan karena dengan adanya investor institusional mampu melakukan monitoring keputusan yang diambil oleh pihak manajer. Hal ini juga dilandasi oleh teori agensi dimana kepemilikan institusional yang tinggi dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja keuangan dengan lebih tinggi sehingga pengawasan akan lebih ketat untuk menghalangi adanya kesempatan bagi pihak manajer menyalahgunakan kekuasaan sehingga kepentingan antara pengelola dengan pemilik dapat sejalan yang menimbulkan dampak baik pada kinerja keuangan perusahaan.

Yaparto et al. (2013) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang mampu mempengaruhi kinerja perusahaan. Jika investor institusional banyak maka akan meningkatkan pengawasan kinerja manajemen menjadi lebih tinggi karena pihak institusi memiliki divisi investasi sendiri sehingga tingkat pengawasan akan lebih ketat dan menghalangi perilaku opportunistic manajer yang menimbulkan kepentingan antara pengelola dengan pemilik bisa sejalan dan menimbulkan dampak positif terhadap kinerja perusahaan. Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Sesuai penelitian yang dilakukan oleh (Handayani, 2018); (Suryanto & Refianto, 2019); (Sari et al., 2019)) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Kusumadewi & Zulhaimi, 2019), (Fadillah, 2017), (Suhartono et al., 2018) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan saham institusional akan mengurangi kinerja keuangan perusahaan. Hal tersebut dikarenakan kepemilikan institusional yang memang memiliki jumlah kepemilikan saham yang sangat tinggi sehingga institusi akan cenderung bertindak untuk kepentingan mereka sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham minoritas dan akan membuat terjadinya ketidakseimbangan dalam penentuan arah kebijakan perusahaan yang nantinya malah lebih menguntungkan pemegang saham mayoritas yaitu pihak institusi. Dengan keadaan yang tidak kondusif tersebut maka tidak akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

2.2.3. Pengaruh Biaya Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan

Pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan (Gantino, 2016). Menurut Wahyuningsih (2012) kinerja keuangan dapat diukur melalui ratio keuangan, antara lain ROA, ROE, pertumbuhan penjualan dan rasio lainnya. Menurut Adnyani et al. (2020) pengungkapan yang semakin luas akan memberikan sinyal positif kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (stakeholder) maupun para pemegang saham perusahaan (shareholder). Semakin luas informasi yang disampaikan kepada stakeholder dan shareholder maka akan

semakin memperbanyak informasi yang diterima mengenai perusahaan. Hal ini akan menimbulkan kepercayaan stakeholder dan shareholder kepada perusahaan. Hal ini yang menyebabkan aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan akan berdampak terhadap kinerja perusahaan (Dahlia & Siregar, 2008). Dengan melakukan kegiatan CSR perusahaan perlu mengeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan. Biaya CSR memang secara pasti mengurangi laba yang diperoleh perusahaan, namun sebenarnya biaya CSR memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan yang nilainya bisa saja lebih besar dari biaya CSR yang dikeluarkan sehingga meningkatkan perolehan laba. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa biaya CSR yang dikeluarkan berpengaruh terhadap kinerja keuangan (profitabilitas) (Yudharma et al., 2016). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sesuai penelitian yang dilakukan oleh; (Khafa & Laksito, 2015); (Gantino, 2016); (Susanti & Magdalena, 2018); (Agnelia et al., 2020)) membuktikan bahwa biaya *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.3. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Judul /Tahun	Variabel	Hasil	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Peneliti: Pande Made Yani Indah Sari, Ni Putu Riasning, Gst Ayu Intan Saputra Rini Judul: Pengaruh Good	Variabel Dependen: Y= Kinerja Keuangan Variabel Independen: X1= Kepemilikan Manajerial	- kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan - kepemilikan institusional berpengaruh tethadap kinerja keuangan	Persamaan Penelitian: - Menggunakan data sekunder - Menggunakan variabel dependen yang sama Perbedaan Penelitian:

	<p>Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2017</p> <p><i>Tahun:</i> 2019</p>	<p>X2=Kepemilikan Institusional</p> <p>X3= Dewan Komisaris Independen</p> <p>X4= Dewan Komisaris</p> <p>X5=Komite Audit</p> <p>X6= CSR</p>	<p>- dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan</p> <p>- komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan</p> <p>- csr berpengaruh terhadap kinerja keuangan</p>	<p>- Penelitian berjalan menggunakan teknik analisis regresi data panel</p> <p>- menggunakan variabel independen <i>good corporate governance</i> yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, biaya <i>corporate social responsibility</i></p>
2.	<p>Peneliti : Nabila Putri Deswara, Astrie Krisnawati, Rr. Sri Saraswati</p> <p>Judul: Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan</p> <p>Tahun: 2021</p>	<p>Variabel</p> <p>Dependen: Y1=Kinerja Keuangan</p> <p>Variabel</p> <p>Independen: X1=Kepemilikan Institusional</p>	<p>- kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan</p>	<p>Persamaan</p> <p>Penelitian:</p> <p>- Menggunakan data sekunder</p> <p>- Menggunakan variabel dependen yang sama</p> <p>Perbedaan</p> <p>Penelitian:</p> <p>- Penelitian berjalan menggunakan teknik analisis regresi data panel</p> <p>- menggunakan variabel independen <i>good corporate governance</i> yang</p>

				terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, biaya <i>corporate social responsibility</i> - Studi kasus Industri Barang Konsumsi
3.	<p>Peneliti : Liani Agnelia, Yuni Rosdiana, Rini Lestari</p> <p>Judul : Pengaruh Biaya Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Kinerja Keuangan</p> <p>Tahun : 2020</p>	<p>Variabel</p> <p>Dependen : Kinerja Keuangan</p> <p>Variabel</p> <p>Independen : Biaya CSR</p>	- Biaya corporate social responsibility (CSR) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan.	<p>Persamaan Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan data sekunder - Menggunakan variabel dependen yang sama <p>Perbedaan Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian berjalan menggunakan teknik analisis regresi data panel menggunakan variabel independen <i>good corporate governance</i> yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, biaya

				<i>corporate social responsibility</i> -Periode yang berbeda dengan penelitian sebelumnya
4.	Peneliti : Lais Khafa, Herry Laksito Judul: Pengaruh Csr, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Keputusan Investasi Pada Kinerja Keuangan Perusahaan Dan Nilai Perusahaan Tahun: 2015	Variabel Dependen: Y1= Kinerja Keuangan Y2= Nilai Perusahaan Variabel Independen: X1= CSR X2= Ukuran Perusahaan X3= Leverage X4=Keputusan Investasi	- CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan - Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan - Leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan - Keputusan investasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan - Kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan	Persamaan Penelitian: - Menggunakan data sekunder - Menggunakan variabel dependen yang sama Perbedaan Penelitian: - Penelitian berjalan menggunakan teknik analisis regresi data panel - menggunakan variabel independen <i>good corporate governance</i> yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, biaya <i>corporate social responsibility</i> Studi kasus Industri Barang Konsumsi

5.	<p>Peneliti : Wufron</p> <p>Judul: Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Serta Implikasinya Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia</p> <p>Tahun: 2017</p>	<p>Variabel</p> <p>Dependen: Y1= Kinerja Keuangan Y2= Nilai Perusahaan</p> <p>Variabel</p> <p>Independen: X1= Total Asset X2=Total Penjualan</p>	<p>- ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total asset berpengaruh terhadap kinerja keuangan</p> <p>- ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total penjualan berpengaruh terhadap kinerja keuangan</p> <p>- ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total asset berpengaruh terhadap nilai perusahaan</p> <p>- ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total penjualan berpengaruh terhadap nilai perusahaan</p>	<p>Persamaan</p> <p>Penelitian:</p> <p>- Menggunakan data sekunder</p> <p>- Menggunakan variabel dependen yang sama</p> <p>Perbedaan</p> <p>Penelitian:</p> <p>Penelitian berjalan menggunakan teknik analisis regresi data panel dan menggunakan variabel independen <i>good corporate governance</i> yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, biaya <i>corporate social responsibility</i></p>
6.	<p>Peneliti :</p>	<p>Variabel</p> <p>Dependen:</p>	<p>- Kepemilikan manajerial,</p>	<p>Persamaan</p> <p>Penelitian:</p>

	<p>Maria Krispinianti Dua Asang, Nova Retnowati, Indah Noviandari</p> <p>Judul: Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun: 2017</p>	<p>Y1= Kinerja Keuangan</p> <p>Variabel Independen: -X1= Kepemilikan Manajerial -X2= Ukuran Dewan Komisaris -X3= Konsentrasi Kepemilikan -X4= Proporsi Utang (Leverage)</p> <p>Variabel Kontrol: - K1= Komposisi Aset Tetap -K2= Ukuran perusahaan</p>	<p>ukuran dewan komisaris, konsentrasi kepemilikan, dan komposisi utang (leverage) secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan</p> <p>- Ukuran dewan komisaris, dan konsentrasi kepemilikan, secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan</p> <p>- Dari variabel kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, konsentrasi kepemilikan, dan komposisi utang (leverage), variabel yang berpengaruh</p>	<p>- Menggunakan data sekunder - Menggunakan variabel dependen yang sama</p> <p>Perbedaan Penelitian: Penelitian berjalan menggunakan teknik analisis regresi data panel dan menggunakan variabel independen <i>good corporate governance</i> yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, biaya <i>corporate social responsibility</i></p>
--	---	--	---	--

			dominan terhadap kinerja keuangan.	
7.	<p>Peneliti : Mochammad Feries Gurdyanto, Kartika Hendra Titisari, Anita Wijayanti</p> <p>Judul: Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan Dan Minuman Di Bei</p> <p>Tahun: 2019</p>	<p>Variabel Dependen: kinerja keuangan perusahaan</p> <p>Variabel Independen: -X1= Dewan Direktur -X2= Proporsi Dewan Komisaris Independen -X3= Kepemilikan Manajerial - X4=Institusional Ownership -X5= Debt to Equity Ratio (DER).</p>	<p>- Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan</p> <p>- Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan</p> <p>- Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan</p> <p>- Institusional ownership tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.</p> <p>- Debt to equity ratio berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.</p>	<p>Persamaan Penelitian: - Menggunakan data sekunder - Menggunakan variabel dependen yang sama</p> <p>Perbedaan Penelitian: Penelitian berjalan menggunakan teknik analisis regresi data panel dan menggunakan variabel independen <i>good corporate governance</i> yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, biaya <i>corporate social responsibility</i></p>

8.	<p>Peneliti : Rilla gantino</p> <p>Judul: Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008- 2014</p> <p>Tahun: 2016</p>	<p>Variabel</p> <p>Dependen: Y= Kinerja Keuangan</p> <p>Variabel</p> <p>Independen: X= CSR</p>	<p>- CSR Berpengaruh terhadap kinerja keuangan</p>	<p>Persamaan</p> <p>Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan data sekunder - Menggunakan variabel dependen yang sama <p>Perbedaan</p> <p>Penelitian:</p> <p>Penelitian berjalan menggunakan teknik analisis regresi data panel dan menggunakan variabel independen <i>good corporate governance</i> yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, biaya <i>corporate social responsibility</i></p>
----	--	--	--	---

2.4. Kerangka Pemikiran

Dalam Penelitian ini teori dasar yang digunakan yaitu teori agensi yang menjelaskan hubungan antara principal dan agent yaitu pemilik dan manajer (Jensen & Meckling, 1976). Hubungan principal agent ada ketika orang yang memiliki perusahaan bukan merupakan orang yang sama dalam mengelola atau mengendalikan perusahaan (Maher & Andersson, 1999). Dalam teori agensi terdapat delegasi wewenang oleh principal terhadap agen, yaitu memberikan

tanggung jawab penuh untuk mengelola operasional perusahaan dengan tujuan menyajahterakan pemilik melalui pengembalian investasi.

Teori agensi mengasumsikan bahwa individu bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi pihak principals yaitu membutuhkan informasi keuangan perusahaan melalui laporan keuangan untuk memonitor kinerja perusahaan dan mengetahui imbal hasil yang diperoleh atas modal yang telah ditanamkan pada perusahaan tersebut. Kepentingan pribadi pihak agent yaitu membutuhkan informasi keuangan untuk mengetahui hasil kinerjanya terhadap perusahaan tersebut dan digunakan sebagai dasar untuk memperoleh kompensasi atas meningkatnya laba perusahaan dan tercapainya tujuan perusahaan. Manajemen laba dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, karena laba perusahaan yang tinggi merupakan salah satu indikator kinerja manajer yang dapat dikatakan berhasil. Tindakan manajemen laba ini untuk memenuhi kepentingan manajer. Kinerja perusahaan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut sehingga perusahaan mendapatkan banyak tambahan modal dalam melaksanakan aktivitas operasinya dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan

Corporate governance dilatarbelakangi oleh *agency theory* (teori keagenan) yang menyatakan bahwa permasalahan *agency* muncul ketika kepengurusan suatu perusahaan erpisah dari kepemilikannya. *Corporate governance* diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan (Gustiandika & Hadiprajitno, 2014).

Kepemilikan manajerial merupakan pihak manajer yang memiliki saham perusahaan. Dengan adanya pihak manajer yang memiliki saham perusahaan akan dapat menyeimbangkan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer sehingga manajer dalam mengambil keputusan akan lebih berhati-hati karena akan merasakan setiap keputusan yang diambil. Hal ini juga dilandasi dengan teori agensi dimana dengan adanya kepemilikan manajerial maka pihak manajerial akan mengambil setiap keputusan lebih hati-hati karena akan berdampak pada dirinya sendiri.

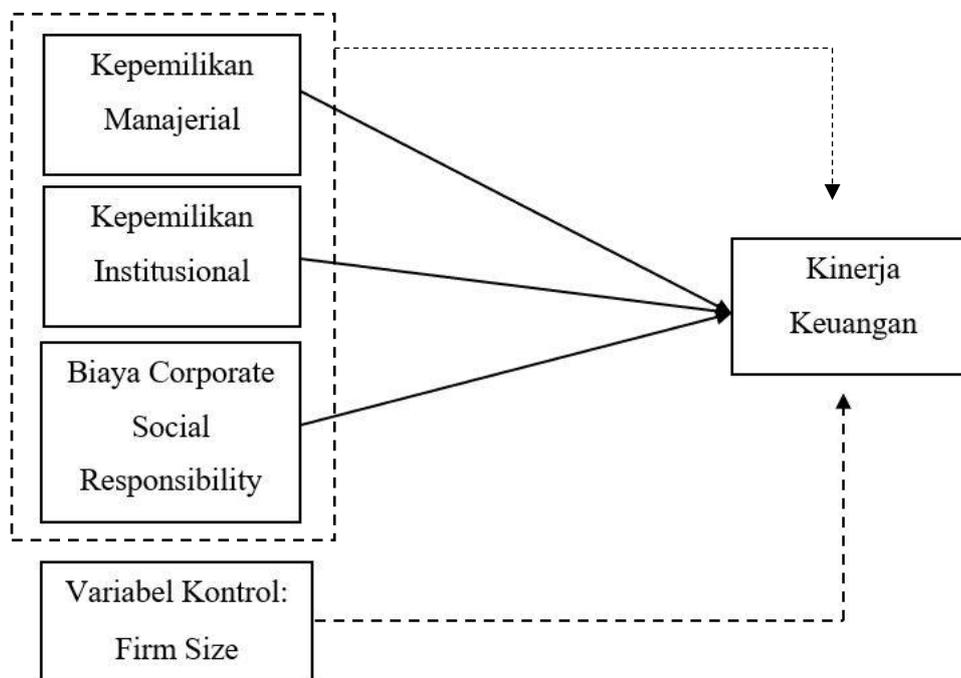
Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja keuangan

perusahaan. Menurut Itturiaga & Sanz (2000) struktur kepemilikan dapat dijelaskan dari dua sudut pandang yaitu pendekatan keagenan (*agency approach*) dan pendekatan ketidakseimbangan (*asymmetric information approach*). Menurut pendekatan keagenan, struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Sedangkan pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara insider dan outsider melalui pengungkapan informasi di dalam pasar modal. Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme GCG yang dapat mengendalikan masalah keagenan.

Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab masing-masing terhadap lingkungan sosial sekitarnya, perusahaan dalam skala yang besar tentunya memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan yang berskala lebih kecil. Menurut Suaryana et al. (2012) menyatakan bahwa teori keagenan perusahaan yang menghadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah cenderung akan melaporkan laba lebih rendah juga dengan menegeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan manajemen. Biaya yang dimaksud yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Ukuran perusahaan menunjukkan seberapa mampu perusahaan dalam menghasilkan laba, semakin besar perusahaan maka semakin tinggi laba yang dihasilkan. Manajer perusahaan menginginkan laba perusahaan yang tinggi, karena laba tinggi menggambarkan bahwa kinerja perusahaan baik. Oleh karena itu, manajer perusahaan besar maupun perusahaan kecil melakukan manajemen laba dengan tujuan membuat laba perusahaan tinggi. Tindakan manajemen laba mengakibatkan konflik kepentingan antara manajer dan pemilik. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan menambah konflik keagenan dan beban meningkat dari ukuran perusahaan yang besar.

Berdasarkan teori dan konsep yang telah diuraikan, maka hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran yang disajikan:



Gambar 2.1 Model Penelitian

2.5. Hipotesis

Berdasarkan uraian tinjauan teoritis dan kerangka berfikir, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan
- H2: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan
- H3: Biaya *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan
- H4: Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan biaya *corporate social responsibility* secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan